



Pengaruh Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah, Literasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang

Sania Leffendi*, Dedy Djefris, Amy Fontanela

Politeknik Negeri Padang

Alamat: Kampus Limau Manis, Kota Padang, Sumatera Barat

Korespondensi: sanialeffendii@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effect of trust in government, tax literacy, tax socialization, and education level on tax noncompliance among UMKM taxpayers in Padang City. The research employs a quantitative approach with the research objects being UMKMs in Padang City that do not possess a Taxpayer Identification Number (NPWP) and are registered at the Office of Cooperatives and SMEs of Padang City. Primary data were collected through observation, questionnaires, and interviews with respondents. The data obtained were processed using IBM SPSS Statistics version 25 and analyzed using multiple linear regression models and classical assumption tests. The findings indicate that trust in government and tax literacy have a negative and significant effect on tax noncompliance. In contrast, tax socialization and education level show no significant effect on tax noncompliance*

Keywords: *tax literacy, tax noncompliance, tax socialization*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kepercayaan kepada pemerintah, literasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan tingkat pendidikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan objek penelitian UMKM yang ada di Kota Padang yang tidak memiliki NPWP dan terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, penyebaran angket (kuesioner), dan wawancara terhadap responden. Data diolah menggunakan perangkat lunak *IBM SPSS Statistics versi 25*, dan dianalisis menggunakan model analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan literasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Sedangkan sosialisasi perpajakan dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

Kata kunci: ketidakpatuhan wajib pajak, literasi perpajakan, sosialisasi perpajakan

LATAR BELAKANG

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60% serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, termasuk di Kota Padang yang berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi local. Namun, potensi besar UMKM belum sebanding dengan tingkat kepatuhan perpajakan yang optimal.

Bentuk ketidakpatuhan ini dapat berupa keterlambatan pelaporan, kesalahan pengisian, hingga penghindaran pajak secara sengaja.

Faktor penting pertama yang diyakini dapat menurunkan tingkat ketidakpatuhan adalah tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Wardani et al. (2022) mengungkapkan bahwa wajib pajak yang memiliki kepercayaan terhadap integritas dan transparansi pemerintah akan lebih cenderung patuh. Secara singkat, ketika UMKM percaya pada pemerintah, mereka lebih patuh membayar pajak. Jika tidak percaya, risiko ketidakpatuhan akan semakin besar.

Faktor berikutnya adalah literasi perpajakan, yaitu pemahaman dan kemampuan wajib pajak dalam memahami konsep, aturan, dan prosedur perpajakan. Studi Setyowati dan Furqon (2025) juga menegaskan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak tentang regulasi dan mekanisme perpajakan berbanding lurus dengan kepatuhan mereka pembayaran pajak. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Yuliati & Fauzi (2020) serta Kusumadewi & Dyarini (2022) yang menyatakan bahwa literasi pajak tidak selalu mampu menekan ketidakpatuhan wajib pajak.

Salah satu faktor lainnya adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas pajak bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan prosedur perpajakan. Menurut Putri dan Nurhasanah (2019), sosialisasi yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak, sehingga menurunkan risiko ketidakpatuhan. Penelitian Yusnidar (2024), Putri dan Nurhasanah (2019), serta Handayani et al. (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan yang baik dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak.

Selain itu, tingkat pendidikan juga sangat menentukan perilaku perpajakan. Meidiyustiani et al. (2022) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak UMKM secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak. Sebaliknya, studi Zainal et al. (2024) menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan sehingga berdampak pada meningkatnya potensi ketidakpatuhan wajib pajak.

TAHUN	TARGET	REALISASI WP OP	REALISASI WP BADAN	REALISASI	TINGKAT KEPATUHAN (%)
2019	72.362	63.361	4.073	67.434	93,19%
2020	66.631	65.007	3.574	68.581	102,93%
2021	69.199	65.419	4.402	69.821	100,90%
2022	64.008	60.229	4.427	64.656	101,01%
2023	76.351	61.797	4.442	66.239	86,76%

Gambar 1 Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Satu Padang, 2024

Data dari KPP Pratama menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di kota ini masih tergolong rendah dan fluktuatif. Berdasarkan data kepatuhan formal tahun 2019 hingga 2023, diketahui bahwa pada tahun 2019 tingkat kepatuhan tercatat sebesar 93,19%, meningkat menjadi 102,93% pada tahun 2020 dan 100,90% pada tahun 2021. Tren positif ini berlanjut di tahun 2022 dengan tingkat kepatuhan 101,01%. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2023, di mana tingkat kepatuhan hanya mencapai 86,76%, jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilaksanakan guna memberikan kontribusi dalam penguatan sistem perpajakan sektor UMKM secara lokal maupun nasional.

KAJIAN TEORITIS

Teori Atribusi (Attribution Theory)

Teori Atribusi yang diperkenalkan oleh Fritz Heider (1958) dan dikembangkan oleh Bernard Weiner (1985) menyatakan bahwa individu berusaha mencari penyebab suatu perilaku, baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun faktor luar. Dalam konteks perpajakan, teori ini membantu menjelaskan apakah ketidakpatuhan dipicu oleh faktor internal atau eksternal. Faktor eksternal misalnya rendahnya literasi perpajakan yang membuat pelaku UMKM kesulitan memenuhi kewajiban dan cenderung menyalahkan sistem yang dianggap rumit. Lemahnya sosialisasi juga dapat memicu wajib pajak menilai kurangnya informasi dan bimbingan dari otoritas pajak sebagai penyebab ketidakpatuhan. Selain itu, rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, misalnya akibat persepsi adanya korupsi atau kurang transparan, dapat mendorong wajib pajak membenarkan ketidakpatuhan sebagai bentuk protes. Sementara itu, pendidikan merupakan faktor internal yang memengaruhi kemampuan memahami aturan pajak, di mana tingkat

pendidikan rendah sering dikaitkan dengan keterbatasan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan.

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Padang memainkan peran yang sangat vital dalam perekonomian lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM dikategorikan menjadi tiga kelompok utama yang masing-masing memiliki kriteria yang berbeda terkait aset dan omset. Berikut adalah kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan UMKM:

Tabel 2. 1 Kriteria UMKM

No	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omset
1	Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 Juta
2	Usaha Kecil	50 Juta - 500 Juta	300 Juta - 2,5 Milyar
3	Usaha Menengah	500 Juta - 10 Milyar	2,5 Milyar - 50 Milyar

Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Ketidakpatuhan wajib pajak adalah perilaku sengaja tidak melaksanakan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Intihanah et al., 2018). OECD (2004) menyebutnya sebagai risiko bagi otoritas pajak karena berpotensi menurunkan penerimaan negara. Bentuk penghindaran pajak meliputi *tax avoidance* (legal), *tax evasion* (ilegal), dan *tax arrears* (tunggakan), yang semuanya berdampak pada berkurangnya penerimaan negara (Hutagol, 2007). Oleh karena itu, reformasi administrasi diarahkan pada peningkatan kepatuhan sukarela melalui *self-assessment* dan edukasi wajib pajak.

Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah memengaruhi kepatuhan pajak UMKM. Menurut Teori Atribusi (Heider, 1958; Weiner, 1985), individu akan mencoba menjelaskan alasan di balik perilaku tertentu dengan mengaitkannya pada penyebab internal maupun eksternal. Dalam hal ini, ketidakpatuhan pajak dapat diasumsikan sebagai hasil dari atribusi terhadap kondisi eksternal, seperti ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ketika masyarakat yakin dana pajak dikelola secara transparan dan adil, kepatuhan meningkat (Salman Latief, 2020). Sebaliknya, rendahnya kepercayaan mendorong penghindaran pajak. Penelitian Deo et al. (2022), Zainudin et al. (2022), dan Ibrahim et al. (2020)

menegaskan bahwa kepercayaan dibangun melalui kinerja pemerintah yang konsisten, transparan, dan responsif. Wardani et al. (2022) menegaskan kepercayaan pada pemerintah memperkuat kepatuhan, sementara Furqon (2021) menemukan tidak ada pengaruh signifikan. Sebaliknya, Handayani et al. (2020) menunjukkan pengaruh positif signifikan.

H1: Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan pajak UMKM.

Literasi Perpajakan

Literasi pajak mencakup pemahaman aturan, tarif, sanksi, dan prosedur perpajakan. Pemahaman yang baik mendorong kepatuhan, sedangkan rendahnya literasi sering menjadi pemicu ketidakpatuhan. Dalam perspektif Teori Atribusi, tingkat literasi perpajakan dikategorikan sebagai faktor internal, karena berkaitan dengan kapasitas kognitif serta pemahaman individu terhadap sistem yang berlaku. Edukasi pajak oleh DJP, seperti pemahaman SPT. Penelitian Yuliati & Fauzi (2020) serta Saharani & Sari (2023) menegaskan bahwa pemahaman yang baik berkontribusi signifikan pada kepatuhan pajak, sedangkan rendahnya literasi memicu kesalahan administrasi maupun ketidakpatuhan disengaja.

H2: Literasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan pajak UMKM.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah sarana otoritas pajak menyampaikan informasi agar wajib pajak memahami kewajibannya. Dalam konteks Teori Atribusi, sosialisasi perpajakan dapat diposisikan sebagai faktor eksternal yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup atau merasa kurang dibimbing dalam memahami kewajiban perpajakan, mereka cenderung mengatribusikan ketidakpatuhan mereka pada lemahnya peran pemerintah dalam memberikan edukasi perpajakan. Sosialisasi yang lemah berpotensi meningkatkan kesalahan pelaporan dan ketidakpatuhan, khususnya pada UMKM (Apriyanti et al., 2024). Windiarni et al. (2020) menemukan bahwa minimnya sosialisasi memicu ketidakpatuhan, sedangkan Poly et al.

(2022) membuktikan bahwa frekuensi dan kualitas sosialisasi berkorelasi positif dengan kepatuhan. Wardani & Wati (2018) juga menekankan pentingnya sosialisasi bagi UMKM.

H3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan pajak UMKM.

Tingkat Pendidikan

Pendidikan memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memahami aturan dan teknologi perpajakan. Dalam perspektif Teori Atribusi, tingkat pendidikan dapat dikategorikan sebagai faktor internal yang melekat pada individu. Wajib pajak UMKM dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung mengatribusikan ketidakpatuhan mereka pada keterbatasan pemahaman atau kurangnya kemampuan untuk memahami aturan yang kompleks, yang merupakan bentuk atribusi internal negatif. Pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan (Saragih et al., 2021; Zainal et al., 2024). Sebaliknya, pendidikan rendah sering menyebabkan kesulitan administrasi maupun penggunaan sistem digital (Floriantina & Nugroho, 2021). Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak berbasis pendidikan dan teknologi menjadi strategi penting untuk menekan ketidakpatuhan UMKM.

H4: Tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek UMKM di Kota Padang yang belum memiliki NPWP namun terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Data primer dikumpulkan melalui observasi, penyebaran kuesioner, serta wawancara dengan responden. Selanjutnya, data diolah menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics versi 25 dan dianalisis dengan metode regresi linier berganda serta uji asumsi klasik.. Dalam menentukan jumlah sampel yang akan diuji dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Slovin. Jumlah sampel dihitung oleh peneliti dengan tingkat kepercayaan 90% dan tingkat kesalahan 10% yang akan dipilih. Adapun rumus Slovin yang digunakan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{47.692}{1 + 47.692(0,1)^2}$$

$$n = \frac{47.692}{477,92}$$

$n = 99,79$ dibulatkan menjadi 100 orang

Jadi berdasarkan perhitungan diatas didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 orang responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Analisis Data

a. Uji Validitas

Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Ketidakpatuhan wajib pajak UMKM (Y)	Y.1	0,766	0,1966	Valid
		Y.2	0,833	0,1966	Valid
		Y.3	0,818	0,1966	Valid
2	Tingkat kepercayaan kepada pemerintah (X1)	X1.1	0,727	0,1966	Valid
		X1.2	0,740	0,1966	Valid
		X1.3	0,697	0,1966	Valid
		X1.4	0,791	0,1966	Valid
		X1.5	0,666	0,1966	Valid
		X1.6	0,692	0,1966	Valid
3	Literasi Perpajakan (X2)	X2.1	0,818	0,1966	Valid
		X2.2	0,711	0,1966	Valid
		X2.3	0,707	0,1966	Valid
		X2.4	0,773	0,1966	Valid
		X2.5	0,720	0,1966	Valid
4	Sosialisasi perpajakan (X3)	X3.1	0,774	0,1966	Valid
		X3.2	0,898	0,1966	Valid
		X3.3	0,845	0,1966	Valid
		X3.4	0,854	0,1966	Valid
		X3.5	0,810	0,1966	Valid
		X3.6	0,739	0,1966	Valid

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, semua indikator dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel, sehingga dapat diikutsertakan ke tahap pengujian selanjutnya.

b. Uji Reabilitas

Tabel 4. 2 Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Ketidakpatuhan wajib pajak UMKM	0,730	Reliabel
2	Tingkat kepercayaan kepada pemerintah	0,814	Reliabel
3	Literasi Perpajakan	0,798	Reliabel
4	Sosialisasi perpajakan	0,899	Reliabel

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha masing-masing variabel lebih besar daripada 0,60. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator dinyatakan reliabel untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 4. 3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.11608309
Most Extreme Differences	Absolute	.050
	Positive	.043
	Negative	-.050
Test Statistic		.050
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan Tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai Signifikan Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05 atau ($0,200 > 0,05$), sehingga data berdistribusi normal.

c. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolonieritas

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	17.678		25.294	.000		
	Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah	-.289	-.529	-5.483	.000	.484	2.067
	Literasi Perpajakan	-.199	-.288	-3.020	.003	.494	2.023
	Sosialisasi Perpajakan	-.021	-.051	-.744	.459	.954	1.048
	Tingkat Pendidikan	-.209	-.061	-.895	.373	.974	1.027

a. Dependent Variable: Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 yang berarti tidak ada korelasi antara variabel bebas.

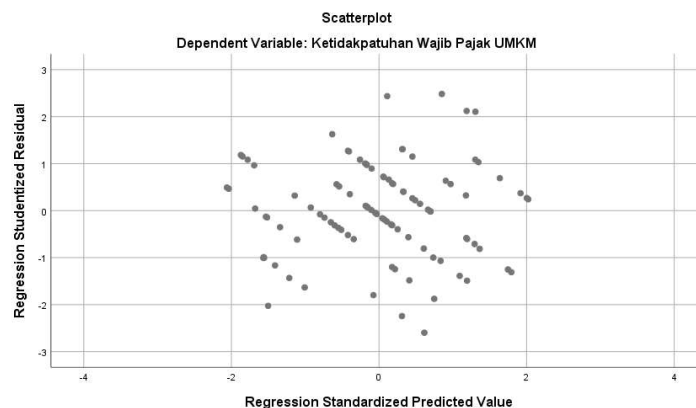
d. Uji Autokorelasi

Tabel 4. 5 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.757 ^a	.573	.555	1.13934	1.736

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas terlihat bahwa nilai Durbin-Watson adalah 1,736. Berdasarkan hasil pengujian data diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi karena nilai durbin-watson berada di antara -2 dan 2.

e. Uji Heteroskedasitas



Gambar 4.1 Grafik Scatterplot

Berdasarkan hasil Gambar 4.1 terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat diindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4. 6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	17.678	.699		25.294	.000
	Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah	-.289	.053	-.529	-5.483	.000
	Literasi Perpajakan	-.199	.066	-.288	-3.020	.003
	Sosialisasi Perpajakan	-.021	.029	-.051	-.744	.459
	Tingkat Pendidikan	-.209	.233	-.061	-.895	.373

a. Dependent Variable: Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM

Nilai koefisien regresi yang digunakan adalah Unstandardized Coefficients.

Berdasarkan nilai tersebut maka dapat dibuat persamaan linier sebagai berikut :

$$Y = 17,678 - 0,289X_1 - 0,199X_2 - 0,021X_3 - 0,209X_4 + e$$

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji T)

Tabel 4. 7 Uji Parsial (Uji T)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	17.678	.699		25.294	.000
	Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah	-.289	.053	-.529	-5.483	.000
	Literasi Perpajakan	-.199	.066	-.288	-3.020	.003
	Sosialisasi Perpajakan	-.021	.029	-.051	-.744	.459
	Tingkat Pendidikan	-.209	.233	-.061	-.895	.373

Diketahui nilai t tabel 1,985 pada taraf signifikansi 5% atau 0,05. Dengan demikian diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pada variabel Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X₁) menunjukkan nilai t hitung sebesar -5,483 < nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak

UMKM sehingga dapat dibuktikan bahwa H1 diterima. Hasil ini menegaskan bahwa kepercayaan kepada institusi negara merupakan fondasi penting dalam mendorong kepatuhan perpajakan, terutama di kalangan pelaku UMKM yang sering kali memiliki keterbatasan dalam akses informasi, pemahaman regulasi, dan sumber daya administratif. Kepercayaan kepada pemerintah berkaitan erat dengan persepsi masyarakat terhadap integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola negara, termasuk dalam mengelola penerimaan pajak. Dengan demikian, tingkat kepercayaan kepada pemerintah terbukti menjadi faktor yang sangat penting dalam membentuk sikap patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban pajak, terutama di kalangan pelaku UMKM. Rendahnya kepercayaan menciptakan ruang bagi pembangkangan dan penghindaran pajak

2. Pada variabel Literasi Perpajakan (X2) menunjukkan nilai t hitung sebesar $-3,020 < \text{nilai } t \text{ tabel sebesar } 1,985$ dan nilai signifikan sebesar $0,003 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa variabel Literasi Perpajakan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM sehingga dapat dibuktikan bahwa H2 diterima. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa literasi perpajakan merupakan faktor fundamental dalam membentuk kesadaran dan perilaku patuh pajak di kalangan pelaku UMKM, yang selama ini menjadi salah satu sektor dengan potensi kepatuhan rendah karena karakteristiknya yang sangat beragam dan informal. Secara umum, literasi perpajakan mengacu pada kemampuan wajib pajak untuk memahami konsep, peraturan, hak dan kewajiban perpajakan, serta mekanisme teknis dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Literasi ini mencakup beberapa dimensi, seperti pemahaman tarif pajak, fungsi NPWP, kewajiban pelaporan SPT, penggunaan aplikasi pajak, dan konsekuensi hukum atas pelanggaran pajak.
3. Pada variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) menunjukkan nilai t hitung sebesar $-0,744 < \text{nilai } t \text{ tabel sebesar } 1,985$ dan nilai signifikan sebesar $0,459 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM sehingga dapat dibuktikan bahwa H3 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh instansi perpajakan belum mampu memberikan dampak yang kuat dalam membentuk perilaku patuh di kalangan pelaku UMKM. Faktor penyebabnya antara

lain seperti keterbatasan jangkauan, metode penyampaian yang kurang menarik, materi yang terlalu teknis, atau minimnya pelibatan masyarakat secara langsung

4. Pada variabel Tingkat Pendidikan (X4) menunjukkan nilai t hitung sebesar $-0,895 <$ nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikan sebesar $0,373 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa variabel Tingkat Pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM sehingga dapat dibuktikan bahwa H4 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan secara parsial belum mampu memberikan pengaruh yang nyata dalam menurunkan ketidakpatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang. , hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak selalu menjadi penentu utama perilaku patuh atau tidak patuh terhadap pajak. Faktor lain seperti literasi perpajakan, motivasi pribadi, dan kesadaran moral turut berperan dalam membentuk perilaku wajib pajak.

b. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4. 8 Uji Silmutan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	165.241	4	41.310	31.824	.000 ^b
	Residual	123.319	95	1.298		
	Total	288.560	99			

a. Dependent Variable: Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, Sosialisasi Perpajakan, Literasi Perpajakan

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 31,824 > nilai F tabel sebesar 2,47 dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, Literasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM.

c. Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 4. 9 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	.757 ^a	.573	.555	1.13934
---	-------------------	------	------	---------

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pendidikan, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, Sosialisasi Perpajakan, Literasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan diatas, menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,555 atau (55,5%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) dipengaruhi oleh variabel Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah (X1), Literasi Perpajakan (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3), dan Tingkat Pendidikan (X4) sebesar 55,5%. Sisanya sebesar 44,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah serta literasi perpajakan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Sementara itu, sosialisasi perpajakan dan tingkat pendidikan tidak terbukti memengaruhi ketidakpatuhan. Mengingat adanya keterbatasan penelitian ini, studi selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lain yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR REFERENSI

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hutagol, J. (2007). *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer* (Ghara Ilmu). 2007.
- Intihanah, Ika Maya Sari, A. J. (2018). 1, 2, III.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Poly Endrayanto EC, Adiputra, A. K., Utami, L. R., & Rahayu, P. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional*, 4(1), 226–236.
- Putri, N. E., & Nurhasanah. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur). *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(2), 213–232. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>

- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi 10*. Salemba Empat.
- Saharani¹, S. A., & Sari², R. P. (2023). The Effect of Tax Literacy on MSME Taxpayer Compliance Moderated Tax Incentives Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Insentif Pajak. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5605–5614. <http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>
- Salman Latief, J. Z. M. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 712–732. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2269>
- Saragih, Rahel Cristine, E. S. T. (2021). Pengaruh Faktor Demografi (Usia, Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Siantar Barat. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 3(2), 117–123. <https://doi.org/10.36985/mzed4642>
- Setyowati, D. A., & Imahda khoiri furqon. (2025). Dinamika Kepatuhan Pajak Terhadap Wajib Pajak Umkm Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.84>
- Sugianto, M. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Andi Offset.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion.
- Setyowati, D. A., & Imahda khoiri furqon. (2025). Dinamika Kepatuhan Pajak Terhadap Wajib Pajak Umkm Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.84>
- Windiarni, R. P., Majidah, S. E., Si, M., Kurnia, S., & Ab, M. M. (2020). THE EFFECT OF TAX SOCIALIZATION, TAX KNOWLEDGE, SERVICE QUALITY, AND TAX AUDIT OF TAXPAYER COMPLIANCE (Studies at UMKM Taxpayers Registered at KPP Pratama Bandung Cicadas Year 2020). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 3220–3226. www.nasional.kontan.co.id,
- Yuliatie, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>